

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Penelitian

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus dalam perkembangan UMKM di Indonesia saat ini adalah mengenai pengelolaan laporan keuangan. Hal tersebut terjadi mengingat saat ini masih banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa pengelolaan laporan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Namun pada kenyataannya, pengelolaan laporan keuangan pada UMKM membutuhkan keterampilan akuntansi yang baik oleh pelaku bisnis UMKM. Kelemahan dalam menyusun laporan keuangan itu disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kurang pemahaman terhadap standar akuntansi

Hal tersebut terlihat dari penerapan konsep-konsep dasar akuntansi yang dilakukan UMKM masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Konsep dasar akuntansi merupakan suatu unsur penting bagi perusahaan, baik berskala kecil maupun besar agar dalam menjalankan usaha, kondisi keuangan yang ada pada perusahaan menjadi teratur dan dengan adanya penerapan konsep-konsep dasar akuntansi, pemilik usaha dipermudah dalam pengambilan keputusan usaha yang mana akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup usaha mereka.

Usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu kegiatan usaha yang berdiri sendiri, berskala kecil, dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau

keluarga. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat dengan UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara khususnya negara Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang bergerak di berbagai bidang diantaranya, usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha industri, usaha jasa, dan sebagainya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat membantu negara dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di negara saat ini, serta mempercepat pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2019 pelaku Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta atau 8% dari jumlah penduduk di Indonesia.

Potensi besar yang dimiliki Usaha mikro kecil dan menengah seringkali terkendala masalah permodalan dalam mengembangkan usaha mereka. Perbankan sangat berhati-hati dalam memberikan kredit usaha, dikarenakan mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi Usaha mikro kecil dan menengah. Sebagian besar pengusaha Usaha mikro kecil dan menengah tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya. Usaha mikro kecil dan menengah cenderung melakukan pencatatan hanya sebatas pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada aktivitas usaha, tanpa melakukan pemisahan pada setiap transaksi. Selain itu, masih banyak diantaranya yang mencampur

keuangan pemilik usaha dengan dana yang digunakan dan diperoleh dari kegiatan entitas usaha.

Setiap perusahaan baik itu dagang, jasa maupun manufaktur memerlukan laporan keuangan sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yaitu dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode yang bersangkutan. Laporan keuangan dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan, dapat mengetahui informasi keuangan yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan sangat penting bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah bahwa masih banyak ditemukan pelaku Usaha mikro kecil dan menengah yang hanya melakukan pencatatan sederhana. Instansi terkait telah memberikan himbauan kepada para Usaha mikro kecil dan menengah untuk menyampaikan laporan keuangan usahanya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Himbauan tersebut sering disampaikan melalui seminar, pembinaan, dan kegiatan lainnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak Usaha mikro kecil dan menengah yang tidak menyampaikan laporan keuangan, meskipun Usaha mikro kecil dan menengah tersebut telah terdaftar di dinas terkait.

Alasan dari para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah bahwa mereka merasa kesulitan di dalam membuat laporan keuangan karena tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, sehingga ada diantara mereka yang harus

meminta bantuan kepada konsultan untuk pembuatan laporan keuangan. Para pelaku Usaha mikro kecil dan menengah juga beranggapan bahwa membuat laporan keuangan adalah sesuatu hal yang tidak penting, asalkan usahanya telah meningkat sudah cukup bagi mereka. Hasil penelitian Hani dan Fauzi (2017) menyatakan bahwa pelaku Usaha mikro kecil dan menengah memiliki persepsi yang kurang baik terhadap laporan keuangan, karena penyusunan laporan keuangan dinyatakan sulit dan memerlukan waktu untuk membuatnya.

Berdasarkan paparan di atas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha mikro kecil dan menengah, untuk itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis penerapan akuntansi pada Usaha mikro kecil dan menengah di pulau sicanang belawan kecamatan medan belawan.

Eksistensi Usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu penunjang perekonomian indonesia dapat diperhitungkan dalam meningkatkan keseimbangan ekonomi, terbukti dengan bertahannya Usaha mikro kecil dan menengah terhadap krisis ekonomi moneter yang melanda indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu bahan baku impor meningkat secara drastis yang mengakibatkan usaha besar melakukan PHK karyawan dan mengalami kebangkrutan. Sektor perbankan juga ikut terpuruk dari sisi permodalan untuk sektor industri karena nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berfluktuasi. Berbeda dengan usaha kecil menengah yang sebagian besar tetap bertahan dan tidak menanggung beban besar dengan adanya krisis tersebut.

Menurut Rohmad Hadiwijoyo dikutip dari Ekonomi Kompas (2011)dalam (Farizal, 2021) terdapat tiga faktor yang membuat Usaha mikro kecil dan

menengah bisa bertahan dengan kondisi ekonomi krisis. Pertama, pada umumnya Usaha mikro kecil dan menengah menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaku Usaha mikro kecil dan menengah tidak ditopang dari pinjaman bank melainkan dari hasil dana sendiri.

Secara umum Kecamatan Medan Belawan Sicanang merupakan salah satu daerah dengan luas wilayah 21,82 km² dan Kecamatan Medan Belawan adalah daerah pesisir kota medan dan merupakan wilayah bahari dan maritim yang berbatasan langsung pada selat malaka dengan penduduknya yang berjumlah 109.908 jiwa (2022). Di Kecamatan Medan Belawan ini terdapat pelabuhan Belawan yang merupakan pelabuhan terbuka untuk perdagangan internasional, regional dan nasional. Pelabuhan belawan ini merupan urat nadi perekonomian sumatera utara khususnya arus keluar masuk barang dan penumpang melalui angkutan laut, sehingga Kota Medan dikenal dengan pintu gerbang indonesia bagian barat.

Berdasarkan PP no. 72 Tahun 1972 dan persetujuan permendagri No.140/2271/PUD, peraturan pemerintah No. 22 Tahun 1973 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 140/4078/K/1978 Tanggal 19 Oktober 1978 tentang pemekaran Kelurahan diwilayah Kotamadya Medan, maka dengan demikian terbentuklah Kecamatan Medan Belawan. Kemudian dengan keluarnya undang – undang No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa / Kelurahan maka desa – desa yang berada diwilayah Ibukota Provinsi diganti dengan Kelurahan, dimana salah satu kecamatan yang mengalami pemekaran

adalah kecamatan Medan Belawan yang semula empat (4) Kelurahan menjadi enam (6) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Belawan I
2. Kelurahan Belawan II
3. Kelurahan Belawan Bahagia
4. Kelurahan Belawan Bahari
5. Kelurahan Belawan Sicanang
6. Kelurahan Bagan Deli

Kelurahan Belawan Sicanang dengan jumlah penduduk 2.527.050 jiwa banyak mendirikan usaha yang membantu kehidupan sehari – hari seperti usaha *laundry* , usaha Fotocopy, rumah makan, kedai klontong, swalayan kecil, salon, penjahit dll. Untuk mengetahui kemajuan usaha penduduk sekitar Pulau Sicanang Belawan maka Usaha mikro kecil dan menengah memerlukan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis mengenai Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) . Pertama Penelitian Kurniawati, Nugroho, dan Arifin (2012) meneliti tentang penerapan akuntansi pada UMKM serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan pada 51 UMKM meliputi pencatatan penjualan (66,67%), pembelian (64,70%), persediaan (52,94%), kas masuk (78,43%), kas keluar (78,43%), biaya (60,78%), dan gaji (47,06%). Pelaporan akuntansi dilakukan hanya sebatas untuk kepentingan pengelolaan usaha. Sebagian besar laporan yang dibuat oleh

pengelola usaha adalah laporan penjualan (66,67%), laporan pembelian (52,94%), laporan pembelian (45,10%) dan laporan gaji (41,18%).

Kedua, Penelitian Ernawati, Asyikin, dan Sari (2016) dalam (Ernawati et al., 2016) meneliti tentang penerapan sistem akuntansi dasar pada di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada 60 UMKM di Kota Banjarmasin masih kurang. Minimnya penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM dikarenakan kurangnya keinginan dari pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan atau pembukuan untuk usahanya dan menganggap bahwa pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan akuntansi terlalu merepotkan.

Ketiga, Penelitian salmiah, indarti, dan siregar (2015) meneliti tentang bentuk penerapan akuntansi pada Usaha mikro kecil dan menengah Kecamatan Sukajadi Binaan dinas koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntan dengan SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% responden telah menerapkan akuntansi bagi UMKM secara lengkap dan 60% dari responden penerapan akuntansi masih dalam bentuk yang sederhana dengan kata lain UMKM belum menerapkan SAK ETAP.

Berdasarkan hal-hal penting yang diuraikan di atas dan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik meneliti “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PULAU SICANANG BELAWAN KECAMATAN MEDAN BELAWAN”. dijadikan referensi dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas data sampel dan melengkapi penelitian penerapan

akuntansi pada UMKM yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di berbagai kota di Indonesia. Peneliti ingin mengetahui apakah UMKM di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan kaidah akuntansi yang baik dan benar dalam penyajian laporan keuangannya. Jika pelaku UMKM telah menerapkan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku, seperti apa penerapan yang sudah dilakukan selama ini. Sedangkan jika UMKM belum menerapkan, maka apa yang menjadi penyebab pelaku UMKM tidak menerapkan akuntansi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan ?
2. Apa saja kendala yang menghambat penerapan akuntansi pada Usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dibatasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini karena keterbatasan waktu dan pengalaman yang dimiliki penulis dan agar pembahas tidak menyimpang dari topik permasalahan yaitu : Penulis melakukan penelitian Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya pada bidang perdagangan yang ada di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki dua tujuan pokok dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk memberi pemahaman peneliti dalam penerapan akuntansi pada Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan sudah sesuai dengan kaidah akuntansi yang baik dan benar.
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan dan memberikan solusi bagi pelaku Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). dalam penerapan akuntansi sesuai kaidah akuntansi yang baik dan benar.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai manfaat dari hasil yang diperoleh, yaitu memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi fakta, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Akuntansi yang baik dan benar. Kegunaan lain yaitu untuk menerapkan materi yang telah diperoleh di bangku perkuliahan sekaligus menggali materi-materi lain yang mendukung penelitian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam melakukan penelitian ini adapun manfaat yang diharapkan bagi peneliti, UMKM, dan Akademisi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai penerapan akuntansi pada sektor UMKM dan kendala yang dihadapi UMKM dalam menerapkan akuntansi dengan benar.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pertimbangan bagi UMKM di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan dapat menerapkan akuntansi yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam perkembangan ilmu akuntansi selanjutnya khususnya informasi akuntansi yang relevan bagi usaha mikro kecil dan menengah.

a. Bagi Penulis

Untuk dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian sebagai menambah pengetahuan penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang sama untuk menyempurnakan penelitiannya lebih baik pada masa yang akan datang.

1.6 Sistem Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terhadap UMKM di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan. Pada akhir bab ini diberikan garis besar mengenai isi penelitian dalam sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab II diuraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan isu dan tujuan penelitian yang diangkat dalam skripsi. Uraian yang terdapat dalam telaah pustaka diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode dan arah penelitian serta pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III menjelaskan rencana dan prosedur penelitian secara ilmiah yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Pada bab ini berisi Metode penelitian meliputi Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV menguraikan tentang hasil penelitian mengenai objek penelitian yaitu UMKM di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan. serta menganalisis data secara menyeluruh sesuai dari jenis penelitian yang dipilih dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V meliputi kesimpulan yang merupakan uraian secara ringkas dan jelas terkait dengan pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian berisi kendala yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya yang merupakan pertimbangan peneliti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Landasan teori didasari oleh literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang penerapan akuntansi pada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Landasan teori berguna dalam menyusun kerangka teoritis dan pedoman bagi peneliti dalam proses penelitian.

2.1.1 Definisi Akuntansi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)(Sunyanto, 1999) akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan menafsirkan hasil-hasilnya. Secara umum, akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. (Kieso, Weygandt, dan Warfield 2016:2) Dalam (M.Pd, 2022).

Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association (AAA) dalam Lisnawati (2012) adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Definisi akuntansi lainnya menurut Bahri (2016:2) (Mulyani, 2018) merupakan

seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan (Samryn, 2014:3). Menurut Kartikahadi (2015:3) akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengomunikasikan suatu aktivitas-aktivitas ekonomi bersifat keuangan yang akan menghasilkan suatu laporan keuangan sebagai informasi kondisi suatu organisasi dengan tujuan untuk menyediakan informasi ekonomi dari sebuah organisasi.

Menurut Wild & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1) dalam (Aulia, 2018) Laporan keuangan digunakan sebagai alat pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi serta penilaian organisasi bagi pihak-pihak berkepentingan (stakeholder). Akuntansi memiliki tiga kegiatan utama yaitu mengidentifikasi dan mengukur data keuangan sebuah organisasi atau perusahaan, mencatat dan memproses data keuangan organisasi, serta menyusun dan mengomunikasikan laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak eksternal dan internal.

2.1.2 Siklus Akuntansi

Akuntansi memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan dengan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan megomunikasikan suatu aktivitas-aktivitas ekonomi bersifat keuangan untuk mendapatkan hasil akhir yaitu laporan keuangan. Tahapan-tahapan akuntansi tersebut yang disebut siklus akuntansi. Menurut Pura (2013:18) Siklus akuntansi adalah sebuah rangkaian aktivitas akuntansi yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan pembukuan. Definisi siklus akuntansi menurut Bahri (2016:18) adalah tahapan-tahapan mulai terjadinya transaksi hingga proses penyusunan laporan keuangan hingga siap digunakan. Menurut Hermawan, Hariyanto, dan Biduri (2016:5) siklus akuntansi digunakan untuk menggambarkan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, pengidentifikasian, pengukuran transaksi keuangan perusahaan sehingga menjadi sumber informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Terdapat beberapa langkah dalam siklus akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Siklus Akuntansi

Berdasarkan pada gambar 2.1 siklus akuntansi merupakan tahapan dari kegiatan mulai terjadinya transaksi hingga terbentuknya laporan keuangan dan selanjutnya kembali ke tahapan awal yaitu adanya transaksi. Kegiatan-kegiatan dalam siklus akuntansi adalah:

1. Menganalisis bukti transaksi
2. Penjurnalan transaksi
3. Memposting akun ke buku besar
4. Mempersiapkan necara saldo
5. Jurnal penyesuaian
6. Mempersiapkan kertas kerja
7. Mempersiapkan laporan keuangan
8. Jurnal penutup
9. Mempersiapkan neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik
10. Memulai siklus akuntansi baru

Tahapan-tahapan tersebut akan di jelaskan pada sub-sub bab sebagai berikut:

1. Menganalisis Bukti Transaksi

Kegiatan siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi dalam perusahaan. Transaksi keuangan yang dimaksud merupakan kejadian yang dapat mengubah dan berdampak pada posisi keuangan (Hermawan, dkk. 2016:5). Transaksi yang bersifat ekonomi pada umumnya seperti transaksi penjualan, pembelian, transaksi yang mengenai biaya maupun transaksi dengan pihak bank yang dicatat dalam sebuah bukti formal. Langkah awal dalam siklus akuntansi adalah menganalisis dokumen sumber terjadinya kejadian atau kegiatan yang

bersifat ekonomi yang dapat disebut sebagai bukti transaksi. Setiap transaksi mempunyai bukti transaksi yang berbeda-beda berdasarkan pada jenis dan besarnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh entitas. Bukti transaksi akan dikumpulkan secara sistematis sebagai dasar pencatatan yang dapat berupa kuitansi, cek, faktur penjualan, faktur pembelian, tanda terima barang, daftar gaji, tanda setoran bank, surat keputusan direktur atau komisaris, dan nota pengiriman barang.

2. Penjurnalan Transaksi

Jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan disuatu unit usaha, yang dimaksud dengan pencatatan kronologis berarti setiap transaksi yang dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadian transaksi berdasarkan nama akun dan jumlah nominal yang harus di debet dan di kredit. Dengan adanya jurnal maka dapat diketahui rekening atau pos-pos akuntansi yang terpengaruh oleh transaksi yang dilakukan perusahaan (Hermawan, dkk. 2016:5).

Terdapat 4 (empat) jenis jurnal yaitu:

- a. Jurnal umum merupakan catatan yang sistematis sesuai dengan kronologis transaksi yang telah dilakukan oleh sebuah unit usaha. Jurnal umum digunakan untuk mencatat penyesuaian pembukuan dan penutupan pembukuan.
- b. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat suatu transaksi pembelian barang dagangan atau aset lainnya secara kredit.

- c. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat suatu transaksi untuk penerimaan kas dari para debitur yang melunasi kewajibannya, penjualan tunai dan penerimaan kas dari sumber lainnya.
- d. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan atau aset lainnya secara tunai yang dilakukan oleh unit usaha.

3 .Memposting akun ke buku besar

Kegiatan memposting akun ke buku besar merupakan kegiatan yang memindahkan akun jurnal di debit dan kredit ke akun buku besar berdasarkan nama akun masing-masing. Buku besar (general ledger) merupakan kumpulan seluruh akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi satu kesatuan dan saling berhubungan. Pada buku besar mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada seluruh akun dan diakhir periode akan terlihat saldo dari masing-masing akun.

4. Mempersiapkan neraca saldo

Setelah semua transaksi telah dikelompokkan ke masing-masing akun dan menghitung besarnya saldo setiap akun, maka langkah selanjutnya adalah pengikhtisaran saldo akun. Kegiatan pengikhtisaran saldo akun menghimpun saldo akun yang terdapat dalam buku besar ke dalam suatu laporan yang dikenal sebagai neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh akun beserta saldo debit maupun saldo kredit yang biasanya disiapkan pada akhir periode ataupun pada saat ingin memastikan keseimbangan saldo pada buku besar.

5. Jurnal penyesuaian

Sebelum menyusun laporan keuangan masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa transaksi. Jurnal penyesuaian adalah tempat pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode untuk menyesuaikan jumlah saldo yang terdapat dalam tiap akun terhadap saldo yang sesungguhnya pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa unsur transaksi yang menjadi alasan untuk melakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi seperti selisih kas kecil, taksiran piutang usaha, biaya pemakaian perlengkapan, biaya dibayar dimuka, penyusutan aset tetap, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan pendapatan yang masih harus diterima.

6. Mempersiapkan kertas kerja atau neraca lajur

Tahap berikutnya adalah memasukan saldo-saldo dari buku besar atau catatan yang disebut neraca lajur. Kertas kerja (worksheet) atau neraca lajur merupakan sebuah hasil ringkasan penjumlahan dari seluruh transaksi yang terdapat pada buku besar. Fungsi lain dari neraca lajur dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun sebuah laporan keuangan yang berupa lembaran kertas berkolom-kolom berisi semua unsur akun riil yang akan dimasukkan dalam neraca maupun akun nominal yang akan dimasukkan dalam laporan laba rugi.

7. Mempersiapkan laporan keuangan

Laporan keuangan yang disajikan UMKM menurut Standar Akuntansi Keuangan EMKM (2016(accounting.binus.ac.id, 2020)) minimal terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang tambahan dan rincian

pos-pos tertentu yang relevan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan atau unit usaha terhadap pemilik atau pihak lain yang mempunyai relasi dengan perusahaan atau unit usaha. Manfaat laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan atau unit usaha untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan unit usaha oleh para pihak-pihak yang berkepentingan.

8. Jurnal penutup

Pada akhir periode akuntansi semua akun nominal harus bersaldo nol untuk siap digunakan dalam mencatat transaksi periode akuntansi berikutnya. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat diakhir periode akuntansi dengan tujuan untuk menutup rekening nominal atau sementara sehingga rekening-rekening ini pada awal periode akuntansi bersaldo nol. Tujuan dari jurnal penutup untuk memisahkan pendapatan dan biaya tahun tertentu dengan tahun berikutnya.

9. Mempersiapkan neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik

Pada akhir periode seluruh akun riil harus disusun kembali untuk penyesuaian atau perubahan yang terjadi atas akun-akun riil dimana saldo akhir akan dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode selanjutnya akan dibentuk dalam sebuah laporan yang disebut juga sebagai neraca saldo setelah penutupan. Jurnal pembalik sifatnya opsional yang dapat didefinisikan sebagai jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu seperti pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar dimuka, beban yang harus dibayar, dan penghasilan diterima dimuka.

2.1.3 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan proses akuntansi, mulai dari menganalisis bukti transaksi hingga pembuatan jurnal pembalik yang dapat memberi gambar kondisi terkini suatu perusahaan atau unit usaha untuk membuat keputusan bagi pihak internal dan eksternal. Laporan keuangan dapat memberikan gambaran secara berkesinambungan transaksi keuangan yang dikuantitatifkan dalam satuan moneter sehubungan dengan pemakaian sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas (Hermawan,dkk. 2016:7). Menurut PSAK I revisi (2015:par. 7) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap dapat meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2016:par. 2.1) adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tersebut dalam (Putra, 2012). Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikelola. Pengguna laporan keuangan meliputi kreditor, debitor, maupun investor.

Sebuah laporan keuangan juga dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dalam rangka pembuatan

keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan dapat menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dalam suatu periode akuntansi. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang dapat meliputi: (1) aset, (2) liabilitas, (3) ekuitas, (4) penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, (5) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan (5) arus kas. Catatan atas laporan keuangan (CALK) juga dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan suatu entitas.

Komponen Laporan Keuangan

Terdapat perbedaan komponen laporan keuangan UMKM dengan komponen laporan keuangan perusahaan yaitu entitas tidak perlu menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas dengan tujuan kemudahan dalam penerapan pengaturan SAK EMKM (2016). Sesuai dengan SAK EMKM (2016:par. 3.9), UMKM perlu menyajikan laporan keuangan minimum terdiri dari:

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, yaitu laporan keuangan yang disajikan secara sistematis meliputi informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu atau pada akhir periode pelaporan. Pos-pos yang mencakup dalam laporan posisi keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

b. Laporan laba rugi (Income statement), yaitu ikhtisar pendapatan dan beban selama satu periode. SAK EMKM (2016:par. 5.2) menyatakan laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos seperti pendapatan, beban keuangan, dan beban

pajak. Pada laporan laba rugi dapat menunjukkan pendapatan maupun biaya dari suatu entitas beserta laba-rugi yang diperoleh berdasarkan konsep matching concept yaitu membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, Menurut Kasmir (2016:28) dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan serta sumber pendapatan yang diperoleh maupun jumlah biaya serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

c. Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan laporan yang berisi tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang disajikan menurut SAK EMKM (2016:par 6.2) pada catatan atas laporan keuangan yang disusun meliputi: (1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, (2) ikhtisar kebijakan akuntansi, dan (3) informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Berdasarkan PSAK I revisi (2015:par. 112) isi dari catatan atas laporan keuangan meliputi: (1) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, (2) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, dan (3) menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria UMKM dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 (Mikro, 2023) mengenai usaha mikro, kecil dan menengah pada bab I pasal 1 UMKM dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan jumlah aset dan omzet yang telah ditentukan dalam undang-undang ini pada bab IV pasal 6 adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00.

Gambar 2. 2 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

No	URAIAN	ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp50 juta	Maksimal Rp50 juta
2	Usaha Kecil	Rp50 juta - Rp500 juta	Rp50 juta - Rp500 juta
3	Usaha Menengah	Rp500 juta - Rp10 miliar	Rp2.500 miliar - Rp50 miliar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Tambunan (2009:2) adalah sebagai berikut:

1. UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilitas tabungan atau investasi di pedesaan sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan untuk berwirausaha.
2. Sangat padat karya, dengan kata lain UMKM mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai salah satu elemen penting dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan.
3. Jumlah perusahaan sangat banyak jauh melebihi usaha besar terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan termasuk kecamatan yang terisolasi. Dengan kata lain kemajuan ekonomi pedesaan dapat diukur oleh kemajuan pembangunan UMKM.
4. UMKM dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis perkembangan usaha yang lebih besar.

2.1.5 Permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan, serta berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008(Fajar Billy Sandi, 2023) mengenai usaha mikro, kecil dan menengah, meskipun UMKM telah menunjukkan peran besar dalam

perekonomian nasional namun masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan penjelasan sebagai berikut:

I. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia yang terbatas Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh SDM baik dari segi pendidikan formal dan keterampilan dalam pengelolaan usahanya dapat mempengaruhi unit usaha yang akan sulit untuk berkembang secara optimal.

b. Kurangnya Permodalan

Modal adalah faktor utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu usaha. Kurangnya permodalan dalam UMKM adalah pada umumnya unit usaha yang tergolong dalam usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki sifat yang tertutup dalam memberikan informasi mengenai unit usaha yang dikelola.

c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil

Pengaruh lemahnya jaringan usaha serta kemampuan penetrasi usaha kecil yang rendah dapat mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan dan memiliki kualitas produk yang kurang kompetitif dalam persaingan usaha.

II. Faktor Eksternal

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya penguasaan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan merupakan faktor utama dalam keterbatasannya sarana dan

prasarana usaha sehingga unit usaha yang dikelola sulit untuk maju dan berkembang.

b. Iklim Usaha

Iklim usaha menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil merupakan suatu kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dengan kebijakan diberbagai aspek kehidupan sosial ekonomi agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan yang seluas-luasnya terutama bagi usaha kecil sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri.

Menurut Penjelasan atas UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, pada saat ini kondisi iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengelola UMKM. Hal ini terbukti dari terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Sehubungan dengan hambatan yang dihadapi oleh UMKM yang bersifat faktor internal dan faktor eksternal maka pemerintah perlu mengembangkan dan membina UMKM serta menumbuhkan iklim usaha dalam rangka mendorong perkembangan UMKM di Indonesia.

2.1.6 Manfaat Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Manfaat penggunaan akuntansi UMKM akan mendapat manfaat yang besar bagi keberlangsungan suatu unit usaha. Ernawati, dkk. (2016) menemukan tentang pentingnya akuntansi bagi UMKM. Akuntansi dapat pula memberikan laporan aktivitas keuangan yang sedang berjalan, akan memberikan dasar informasi dalam pengambilan keputusan yang strategis mengenai perkembangan

unit usaha. Penerapan akuntansi dasar pada UMKM yang menghasilkan laporan keuangan sebagai output akan memperlancar kegiatan usaha, bahan evaluasi kinerja, memperlakukan perencanaan yang efektif sehingga dapat meyakinkan pihak eksternal dalam keikutsertaan penanaman modal pada unit usaha maupun peminjaman dana oleh kreditor.

Melalui penyajian akuntansi UMKM dapat mengevaluasi kinerja usaha seperti besarnya pencapaian target penjualan, efisiensi pengeluaran untuk biaya produksi serta mengetahui seberapa besar pencapaian laba usaha. Dengan data yang diperoleh pemilik usaha dapat mengetahui strategi yang akan digunakan berkaitan dengan kondisi unit usaha terkini. Penggunaan akuntansi untuk segala aktivitas usaha juga akan berpengaruh pada pencatatan pengeluaran dan penerimaan pada suatu unit usaha secara jelas dan kronologis untuk setiap transaksi. Manfaat penggunaan akuntansi bagi UMKM lainnya adalah memudahkan pelaporan kepada kantor pajak dan semua transaksi dan aktivitas usaha yang terjadi di unit usaha dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang penerapan akuntansi pada UMKM telah banyak mengalami perkembangan dari segi pengambilan data UMKM di berbagai kota di Indonesia dengan metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang menghasilkan hasil penelitian beragam terkait dengan penggunaan akuntansi sesuai dengan kaidah yang berlaku pada UMKM. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam penelitian dan dapat membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, dkk. (2012) membahas tentang analisis penerapan akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 51 UMKM di Kota Salatiga. Hasil penelitian menjelaskan kendala yang menghambat dalam penerapan akuntansi yaitu latar pendidikan kurang memadai, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Dari segi pengelola belum ada kebutuhan terhadap penerapan akuntansi sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Namun sebagian besar UMKM di Salatiga telah melakukan pencatatan atas penjualan, pembelian, persediaan, biaya gaji, dan biaya lainnya sedangkan pelaporan yang dibuat meliputi laporan penjualan, pembelian, persediaan, dan penggajian.

Salmiah, dkk. (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru apakah telah sesuai dengan SAK ETAP. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 40% dari UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SAK ETAP dan 60% dari sampel penelitian masih dalam bentuk sederhana dan belum sesuai dengan SAK ETAP. Dalam segi pemahaman isi SAK ETAP penelitian ini menemukan bahwa 83% dari responden tidak memahami isi SAK ETAP, 70% responden tidak menggunakan software akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu dan relevan, serta 70% dari responden tidak memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan sehingga informasi keuangan yang dimiliki tidak lengkap. Hal

ini terjadi disebabkan minimnya pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi secara lengkap dan sesuai SAK ETAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati, dkk. (2016) dalam (SYAHID et al., 2021) mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran penerapan sistem akuntansi dasar pada UMKM di Kota Banjarmasin dengan 60 orang pengelola UMKM sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi oleh UMKM yang bergerak dalam bidang usaha dagang di Kota Banjarmasin masih minim. Hasil ini disebabkan karena kurangnya keinginan pelaku usaha untuk melakukan pencatatan untuk usahanya yang terlalu merepotkan dengan kata lain kurangnya motivasi pelaku UMKM untuk memperbaiki pencatatan akuntansi untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Surikayanti (2015)(Hengki Wijaya, 2018) memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi yang dilakukan pada 20 pelaku UKM Jalan Seram Kecamatan Medan Perjuangan dan menganalisis penerapan akuntansi yang telah diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi yang telah dilakukan masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi pada usahanya. Sebagian besar UKM hanya membuat laporan laba-rugi dan belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari dinas yang terkait maupun lembaga yang menaungi UKM.

Penelitian yang dilakukan Srikandi dan Setyawan (2010) dalam (Meriana, 2021) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para pelaku UKM menerapkan pengelolaan keuangan melalui siklus akuntansi yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja dan kesehatan UKM, serta untuk mengetahui jenis usaha mana yang melakukan penerapan kaidah akuntansi dengan baik dan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UKM masih rendah dalam menerapkan kaidah akuntansi melalui siklus akuntansi. Jenis usaha yang telah menerapkan kaidah akuntansi yang paling baik adalah usaha manufaktur. Peneliti berharap bahwa pihak terkait yaitu pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak lain dapat memberikan perhatian terhadap pelaku UKM di Kota Yogyakarta untuk menerapkan kaidah akuntansi yang baik dan benar agar pelaku UKM dapat menyadari pentingnya penerapan siklus akuntansi terhadap keberhasilan usaha mereka.

2.2.1 Standar Akuntansi

Jenis-Jenis PSAK Saat ini, ada 5 jenis SAK yang berlaku di Indonesia. Tiap SAK ini digunakan oleh badan usaha berdasarkan jenis usaha atau organisasinya. Berikut ini adalah jenis-jenis SAK:

1. PSAK-IFRS

PSAK merupakan perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2021, dan disusun mengikuti standar IFRS serta menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia. Jenis PSAK ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan publik. Sebab, terdapat penilaian transaksi dan evaluasi pada

laporan keuangan yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara real. Penerapan jenis PSAK ini juga memberikan manfaat seperti memberikan informasi yang berkualitas pada pasar modal, meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, hingga meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri.

2. SAK-ETAP

SAK-ETAP adalah singkatan dari standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Berdasarkan namanya, jenis PSAK ini digunakan jika perusahaan belum atau tanpa akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Jenis PSAK ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. Dalam SAK-ETAP, tidak dilakukan pencatatan laporan laba rugi untuk mempermudah pengguna dalam melakukan analisis laporan. Selain itu, aset takberwujud, aset tetap, dan juga properti investasi pasca tanggal perolehan menggunakan harga perolehan untuk menentukan nilainya. Jenis PSAK ini cocok diterapkan oleh bisnis menengah dan kecil karena pemilik bisnis dapat menyusun laporannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.

3. PSAK-Syariah

Jenis PSAK ini digunakan oleh badan usaha yang memiliki kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Pihak yang menetapkan PSAK-Syariah ini adalah Dewan Standar Syariah IAI. Penyusunan SAK ini dilakukan secara konseptual, seperti kerangkanya terdiri atas penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi

syariah. Namun dalam implementasinya, dapat menggunakan SAK umum jika dibutuhkan.

4. SAK-EMKM

SAK-EMKM adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Jenis standar ini mengacu pada UU 20/2008 terkait UMKM. Jadi berdasarkan namanya, jenis standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK-ETAP.

5. SAP

SAP merupakan standar akuntansi Pemerintah, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh instansi Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adanya SAP diharapkan dapat menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang penting untuk ditetapkan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong (2007:4) berpendapat penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Menurut Bungin (2007:68) dalam (Hengki Wijaya, 2018) tipe penelitian deskriptif bertugas untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran kondisi situasi ataupun fenomena tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh data yang mendeskripsikan topik yang diminati (Sekaran, 2016:43).

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan yang diperoleh melalui situs resmi Pelaku Ekonomi Kota Belawan.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat 25 UMKM mulai dari golongan mikro, kecil, hingga menengah dengan berbagai jenis produk yang dihasilkan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih relevan dari beragam jenis usaha untuk melakukan penelitian penerapan akuntansi pada UMKM.

Menurut Sugiyono (201:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diteliti dianggap dapat menggambarkan populasinya. Metode sampling yang digunakan untuk penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang disajikan sebagai kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. UMKM yang berlokasi di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan
2. UMKM telah melakukan kegiatan penjualan secara berkelanjutan

Peneliti menemui responden penelitian yaitu UMKM yang tersebar pada Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan yang mana terdapat UMKM didalamnya. Peneliti melakukan penelitian hingga mencapai jumlah sampel yang dianggap sudah memenuhi syarat untuk penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di pulau sicanang belawan kecamatan medan belawan sebanyak 25 UMKM. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum berbadan hukum yaitu sebanyak 25 Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun usaha yang termasuk UMKM yaitu usaha yang memiliki modal usaha sesuai dengan ketentuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 3. 1

NO	Daftar Usaha	Alamat
1	Kedai Koko	Blok 16
2	Toko Panjaitan	Blok 16

3	Toko Sembako Lomo	Blok Kandas
4	Warung Makan Minang Wak En	Blok 21
5	Fotocopy Nursida	Blok 20
6	Toko Sembako Bila	Blok 19
7	Bima Cafe	Blok 22
8	Toko K. Ginting	Blok B
9	Niko Ponsel	Simpang Sicanang
10	Apotek Chelsea	Blok 16
11	Apotek Lasma	Blok 24
12	Jesika Taylor	Blok 17
13	Panjaitan Catering	Blok Kandas
14	Toko Clarisa	Blok 16
15	Rian Service	Blok 20
16	Bank Sampah & Rumah Kompos	Blok 21
17	Ekowisata Mangrove Sicanang	Blok 16
18	Fotocopy Yohana	Blok 16
19	Kede Indira	Blok 21
20	Uli net	Blok 19
21	Warung Nasi Bu Wati	Blok 19
22	Salon Juli	Blok 18
23	Bakso Nenek	Pos
24	Qolbu Minimarket	Pos
25	Warung Bakso Murni	Blok 7

3.3 Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode pengumpulan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari pengelola atau pemilik dari UMKM melalui penyebaran kuisioner secara langsung pada UMKM di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Menurut Hasan dalam Dini (2016) data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data UMKM Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk memperoleh data secara terperinci. Menurut Moleong (2005:58)(Penelitian & Pendekatan, n.d.) teknik pengumpulan data merupakan cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan wawancara

langsung secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide) sesuai dengan pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan adalah pemilik atau pengelola UMKM di Pulau Sicanang Belawan Kecamatan Medan Belawan. Jenis kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner semi terbuka dengan pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan penerapan akuntansi pada UMKM namun responden diberikan tempat kosong untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan kondisi yang jawabannya tidak terdapat pada pilihan jawaban.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan apabila data yang diperoleh dalam penelitian adalah data yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Teknik analisis data menurut Sugiyono (2016:147)(Sugiyono, 2018) adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Menurut Miles dan Huberman (dalam Bungin, 2012:69-70) berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari informan dengan wawancara, observasi, atau dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang terdapat dua aspek yaitu catatan deksripsi yang merupakan catatan alami berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Tahap kedua adalah catatan refleksi merupakan catatan yang memuat kesan pesan, komentar berserta tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian Data

Kegunaan penyajian data untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Jumlah data yang diperoleh yang banyak dapat mempersulit peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan.

4. Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan adalah usaha guna mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola kejelasan, alur sebab akibat atau proporsi.